



Ratusan Miliar Rupiah Aset Pemprov Belum Terinventarisasi



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Senilai Rp226,9 miliar nilai aset hasil serah terima aset personel, pendanaan, sarana, dan prasarana, serta dokumen (P3D) Pemprov Banten hingga kini belum terinventarisasi¹.

Hal tersebut terungkap dalam rapat rekonsiliasi² data aset perolehan triwulan III tahun 2018 di aula kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (1/11).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, aset tetap³ P3D yang belum seluruhnya terinventarisasi terdiri atas aset perolehan sampai dengan 2015

¹ Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (Pasal 1 Angka 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).

² Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah (Pasal 15 Ayat (3) huruf h, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

³ Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;



untuk kartu inventarisasi barang (KIB) B berupa peralatan mesin dan KIB E berupa aset tetap lainnya senilai Rp226,9 miliar. “Kalau dijumlahkan hingga 2015 ada aset senilai Rp226,9 miliar yang belum terverifikasi,” ujarnya.

Ia mengakui, aset tetap atas P3D belum seluruhnya diinventarisasi terhadap aset tetap gedung dan bangunan yang belum diserahkan. Antara lain, SMK Negeri 2 Pandeglang, SMK Negeri 4 Pandeglang, SMK Negeri 6 Pandeglang, serta SMK Negeri 8 Pandeglang dengan nilai aset sebesar Rp693,7 juta. “Rekonsiliasi data dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Banten. Kami sedang menjajaki kerja sama dengan penyedia Atisisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah),” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 yang segera harus ditindaklanjuti, di antaranya aset tetap atas pelimpahan kewenangan P3D yang belum seluruhnya terinventarisasi. “Atas itulah kami langsung menindaklanjutinya sekaligus melakukan upaya agar laporan aset pada LKPD 2018 bisa lebih baik,” terangnya.

Hal pertama adalah pihaknya pada pertengahan November ini akan melakukan rekonsiliasi persiapan dengan membuat neraca aset sampai realisasi anggaran. Selanjutnya, melakukan inventarisasi atau cek fisik hasil pengalihan aset P3D untuk pengadaan sampai tahun 2015 untuk KIB B dan KIB E yang melibatkan masing-masing pengurus barang unit sekolah. “Kami juga akan menggunakan Atisisbada yang berbasis *web*. Harapannya, penyajian nilai aset tetap dapat menggunakan satu *database* dan terintegrasi pada aplikasi Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan),” katanya.

3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

4. Aset Tetap Lainnya; dan

5. Konstruksi dalam Pengerjaan.

(PSAP 07 dari Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis 09 Tentang Akuntansi Aset Tetap).



Selain itu, pihaknya juga telah melakukan cek fisik dan labelisasi seluruh barang hasil pengadaan tahun anggaran 2017 di seluruh OPD pada Mei-Agustus 2018. Melakukan koordinasi dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Pandeglang terkait tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2017. “Itu berkaitan terhadap aset tetap gedung dan bangunan yang belum diserahkan untuk segera menginventarisasi dan menyerahkan data tersebut,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten Ajat Sudrajat mengatakan, nilai audit aset Pemprov Banten di 2017 mencapai Rp19.483.454.126.948 yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kendati demikian, kata Ajat, BPK mencatat terdapat aset senilai Rp919 juta yang belum seluruhnya diinventarisasi. Aset tersebut dikelompokkan dalam enam KIB. KIB A (tanah) Rp8.658.699.375.148, KIB B (peralatan dan mesin) Rp1.974.992.016.093 dan KIB C (gedung dan bangunan) Rp2.753.371.760.638. Selanjutnya, KIB D (jalan, irigasi, dan jaringan) Rp5.793.882.188.191, KIB E (aset tetap lainnya) Rp99.941.254.793, dan KIB F (konstruksi dalam pengerjaan) Rp197.431.583.455.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Ratusan Miliar Rupiah Aset Pemprov Belum Terinventarisasi, 5 November 2018.

Catatan:

Ketentuan mengenai penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal terkait inventarisasi barang milik daerah diatur pada:



Pasal 476:

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.